

ABSTRAK

Setiap daerah mengadakan Pilkada setiap lima tahun untuk memilih Kepala Daerahnya. Namun, berdasarkan Undang-Undang Pilkada, pada tahun 2024 Pilkada akan dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Nasional, yang mengakibatkan kekosongan jabatan Kepala Daerah dari 2022 hingga 2024. Salah satu daerah yang terdampak adalah DKI Jakarta. Pengisian kekosongan jabatan Gubernur DKI Jakarta dengan Penjabat menjadi permasalahan politik yang sedang diperdebatkan. Keterlibatan masyarakat dalam proses penunjukan ini sangat minim, menyebabkan munculnya berbagai tanggapan dan spekulasi dari masyarakat. Penunjukan pejabat publik tanpa partisipasi masyarakat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan *good governance* yang mengutamakan partisipasi rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pandangan Responden Mahasiswa UPNVJ dalam menyikapi pergantian Gubernur DKI Jakarta dengan Penjabat Gubernur dilihat berdasarkan asas *good governance*.

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed-method*) yaitu menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Responden sebanyak 100 mahasiswa UPNVJ yang berdomisili di DKI Jakarta dipilih menggunakan metode *non-probability sampling*, yaitu *purposive sampling* dari total populasi sejumlah 5701 mahasiswa. Metode ini melibatkan tahapan wawancara dan studi kepustakaan (*library research*) sebagai bagian dari metode kualitatif, serta penyebaran kuisioner berupa gform sebagai proses pengumpulan data kuantitatif untuk memvalidasi temuan dari penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *Pertama*, berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif, pengisian jabatan oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta belum memenuhi prinsip transparansi dan demokratis. *Kedua*, terdapat keraguan terhadap implementasi prinsip akuntabilitas dan *good governance* dalam pengisian jabatan tersebut, yang didukung oleh temuan data kuantitatif dan kualitatif. *Ketiga*, berdasarkan data kuantitatif responden melaporkan ketiadaan tempat bagi masyarakat menyampaikan pendapat dan kurangnya keterbukaan informasi, sementara data kualitatif mengonfirmasi kurangnya keterbukaan informasi dan menganjurkan penyebaran informasi melalui media elektronik dan cetak. *Keempat*, mayoritas responden setuju bahwa pengisian jabatan sesuai undang-undang, seperti yang terlihat dalam data kuantitatif dan kualitatif. *Kelima*, mahasiswa UPNVJ mendukung pengisian jabatan oleh PJ Gubernur untuk menjaga kelancaran pemerintahan daerah. Hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif saling mendukung, menunjukkan konsistensi dalam pandangan mahasiswa UPNVJ terhadap PJ Gubernur dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan responsif terhadap tuntutan masyarakat.

Kata Kunci : Pilkada 2024, Kekosongan Jabatan, Penjabat Gubernur, Good Governance.

ABSTRACT

Each region holds regional elections every five years to elect its regional head. However, based on the Elections Law, in 2024 the regional elections will be held simultaneously with the National Elections, resulting in the vacancy of the position of Regional Head from 2022 to 2024. One of the affected areas is DKI Jakarta. Filling the vacancy in the position of Governor of DKI Jakarta with the Acting is a political issue that is being debated. Community involvement in the appointment process was minimal, leading to various responses and speculations from the public. The appointment of public officials without public participation is contrary to the principles of democracy and good governance which prioritizes people's participation as power holders. This study aims to find out the views of UPNVJ Student Respondents in responding to the replacement of the Governor of DKI Jakarta with the Acting Governor based on the principles of good governance.

This research uses a mixed method, which uses quantitative and qualitative methods. Respondents as many as 100 UPNVJ students domiciled in DKI Jakarta were selected using the non-probability sampling method, which is purposive sampling from a total population of 5701 students. This method involves the stages of interviews and library research as part of qualitative methods, as well as the distribution of questionnaires in the form of g-form as a quantitative data collection process to validate findings from qualitative research.

The results of this study show: First, based on quantitative and qualitative data, the filling of positions by the Acting Governor of DKI Jakarta has not fulfilled the principles of transparency and democracy. Second, there are doubts about the implementation of the principles of accountability and good governance in filling the position, which is supported by quantitative and qualitative data findings. Third, based on quantitative data, respondents reported a lack of places for the public to express opinions and a lack of information disclosure, while qualitative data confirmed a lack of information disclosure and encouraged the dissemination of information through electronic and print media. Fourth, the majority of respondents agreed that the filling of positions is lawful, as seen in quantitative and qualitative data. Fifth, UPNVJ students support the filling of positions by PJ Governor to maintain smooth local government. The results of quantitative and qualitative research support each other, showing consistency in UPNVJ students' views on PJ Governor in achieving sustainable development and responsive to community demands.

Keywords: Pilkada 2024, Vacant Position, Acting Governor, Good Governance.